**OPTIMALISASI PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF (DESMIGRATIF) DI DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN**

(Studi Pada Masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

**PROPOSAL**

****

Oleh

**MUH KHULUKUL AMIN**

NIM. E84212080

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushulludin

Jurusan Filsafat Politik Islam

Surabaya

2019

1. **Latar belakang**

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara kesatuan republic Indonesia pasal 1 undang-undang nomor 5 tahun 1979 bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasauk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam iakatran Negara kesatuan republic Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri, walaupun dengan jabatan yang sama merupakan faktor pendorong utama calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Namun selama ini sebagian besar masyarakat yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri belum mendapatkan informasi akurat untuk bekerja di luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak pada terjadinya korban perdagangan manusia (trafficking in person).

Di sisi lain TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI (remittence) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Selain itu juga anak anak TKI tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang baik. Untuk itu pemerintah perlu membuat program yang bersifat koordinatif dan terintegrasi untuk menjawab semua permasalahan diatas.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi CTKI/TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI, dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CTKI/TKI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. [[2]](#footnote-3)

Dengan konsep ini, pemerintah desa diharapkan lebih berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak pra penempatan, hingga kembali ke daerah asal. Karena Pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus mampu memberikan informasi tentang cara menjadi TKI sesuai dengan prosedur yang berlaku, sejak pra, hingga kembali ke daerah asal dengan aman, cepat, mudah dan berbiaya murah.

Selain itu, program desmigratif ini juga membidani penciptaan usaha produktif melalui pelatihan usaha, pendampingan usaha serta bantuan saranausaha produktif hingga pemasarannya. Melalui program dimaksud diharapkan keluarga TKI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usaha-usaha produktif.

Program desmigratif juga mengembangkan community parenting, dimana masyarakat, orang tua dan suami/istri TKI yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang cara mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan anak dengan benar dan tepat, agar mereka terus bisa bersekolah mengembangkan kreatifitasnya.

Di samping itu juga program desmigratif dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dan kemudahaan akses permodalan yang terorganisir dapat berbentuk koperasi usaha, Baitul Mal WatThamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan bentuk lembaga keuangan lainnya yang menjadi inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah.

Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Desa payaman kecamatan sslokuro merupakan desa yang memiliki peduduk khususnya yang laki-laki mayoritas bekerja diluar negeri terutama Malaysia, lahan pertanian yang tidak terlalu bisa diharapkan karena tanah yang tandus dan bebatuan untuk dijadikan lahan pertanian memaksa mereka untuk merantau keluar negeri.

Sementara ketika suami berada di perantauan dengan waktu yang tidak bisa diperkirakan pulangnya maka para istri biasanya menjadi penjaga anak dan rumah saja. Pendapatan dari kiriman suami tidak bisa diharapkan tiap bulan datangnya sehingga mengandalkan pinjaman kepada tetangga dan sanak keluargalah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hal inilah yang membuat pemerintah desa membuat kegiatan positif untuk membantu perekonomian warga dan juga untuk mengisi waktu yang banyak luangnya tersebut.

Secara kebetulan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lamongan memiliki progam Desmigratif yaitu sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memberikan fasilitas terhadap para migran yang bekerja diluar negeri berikut keluarganya yang ditingggalkan di tanah air dengan memberikan bantuan berupa peralatan. Program desmigran bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap pekerja migrant yang akan bekerja keluar negeri dan setelah bekerja diluar negeri serta perlindungan terhadap PMI dan keluargnya.

Program ini terdiri atas seperangkat kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara Kemnaker, beserta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintahan desa. Sasarannya yaitu pelayanan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri, PMI Purna, dan keluarga PMI.

*“Program Desmigratif bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran sejak dari desa. Program ini sengaja dihadirkan di desa-desa yang kebanyakan warganya bekerja sebagai pekerja migran atau lazim disebut desa kantong TKI,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.[[3]](#footnote-4)*

Dengan program desmigratif ini, kata Hanif, pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan akan dilibatkan lebih aktif dalam persoalan pelayanan dan penempatan PMI, mulai dari sebagai pusat layanan informasi, komunikasi, bagian integral penempatan, hingga koordinasi terhadap perlindungan PMI sejak pra penempatan, hingga purna penempatan.

Keterlibatan pemerintah desa penting dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal. Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini, menyebabkan banyak aparatur pemerintah desa tak mengetahui ada warganya bekerja keluar negeri.

Empat pilar utama Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja diluar negeri, community parenting untuk keluarga pekerja migran dan pembentukan koperasi Desmigratif.[[4]](#footnote-5)

*“Ada empat konten kegiatan utama dari program Desmigratif ini, keempatnya saling dukung satu sama lain agar program ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat berjalan secara berkesinambungan,” Jelas Menaker*. [[5]](#footnote-6)

Program desmigratif ini diatur dalam peraturan kementerian ketenagakerjaan nomor 59 tahun 2017 tentang desa migrant produktif[[6]](#footnote-7), program desmigratif ini dilaksanakan agar adanya pemberdayaan masyarakat desa serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya, dan pembinaa masyarakat desa perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendorong peningkatan ekonomi desa.

Adanya program yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi desa, karena sebelum adanya progam desmigratif ini, masyarakat di desa payaman hanya bertumpu pada kiriman suami yang bekerja diluar negeri, dengan demikian kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program serta pendampingan langsung oleh pemerintah desa sangat diharapkan untuk mengoptimalkan program desmigratif di desa payaman kecamatan solokuro kabupaten lamongan.

program Desmigratif di desa Payamaan resmi terbentuk pada tanggal 17 Februari 2018 diinisiatori oleh Kepala Desa, BPD dan juga warga Masyarakat Desa Payaman yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Payaman membuat sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kemudian diberi nama “ UKM KARYA MANDIRI” yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan tentang program desmigratif yang di kelola pemerintah Desa telah menjalankan beberapa unit usaha untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya hanya dikelola oleh perorangan, dan sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa untuk mengelola dan menjalankannya.

Namun dalam pelaksanaanya terdapat sejumlah masalah yang membuat program desmigratif di desa payaman kecamatan solokuro kabupaten lamongan dinilai belum maksimal, seperti yang diutarakan oleh salah satu anggota:

*“Sebenere wes apik mas, kadese gelem gawe program usaha ngene, tapi pemasarane repot mas, mok awale kae tok wong balai deso ngewangi, saiki ganti kades tambah dijarno njar, rakurusan blas, yo mok ngejebno titip-titip nang took mbek neng ono pesenan tok mas”[[7]](#footnote-8)*

Keterlibatan pemerintah desa penting dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal. Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini, menyebabkan banyak aparatur pemerintah desa tak mengetahui ada warganya bekerja keluar negeri.

*“Keterlibatan aparat pemerintahan di desa-desa perlu diperkuat. Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik karena banyaknya calo beredar di desa-desa. Ini harus terus kita benahi dengan program desmigratif secara optimal,” kata Hanif.*

Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kinerja aparatur desa dan bagaimana fungsi aparatuir desa dalam mengembangkan masyarakat desa, perlu diketahui didesa juga ada program pendampingan desa yang dapat dimanfaatkan untuk pendampingan pengembangan program Desmigratif. Pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, usaha untuk menggalakkan pengembangan masyarakat desa yang memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pengembangan desa. Dimana kesadaranb warga, partisipasi masyarakat serta peran pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam meningkatkan ekonomi banyak tergantung pada kemampuan aparat desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pengembangan desa. Berdasarkan, Pemerintah Desa payaman Kecamatan solokuro kabupaten lamongan masih kurang peranannya dalam memberdayakan masyarakat, hal ini diketahui dari hasil pra penelitian dengan wawancara pada warga desa yang ada dilokasi penelitian yang menyatakan bahwa kurangnya peran aparatur desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program desmigratif.

Padahal diharapkan pemerintah Desa Payaman dapat melakukan pemberdayaan masyarakat terpadu yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin mengetahui “Optimalisasi Progam Desmigratif (Desa Migran Produktif) Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”.

1. **Rumusan masalah**
2. Bagaimana Peranan dinas ketenaga kerjaan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui progam Desmigratif di Desa Payaman kecamatan solokuro kabupaten Lamongan?
3. Faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa payaman dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Desa Payaman kecamatan solokuro kabupaten Lamongan?
4. **Tujuan penelitian**
5. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Payaman kecamatan solokuro kabupaten Lamongan
6. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Payaman kecamatan solokuro kabupaten Lamongan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pemberdayaan masyarakat dan sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah Payaman kecamatan solokuro kabupaten Lamongan dapat menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

1. **Definisi konseptual**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dalam proposal ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang berbagai istilah yang terdapat dalam proposal ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan ialah:

* Optimalisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tetinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalanproses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system,atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.[[8]](#footnote-9)

* Desmigratif

Program desmigratif adalah program untuk pananganan desa migrant produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon tenaga kerja indonesia, tenaga kerja Indonesia purna beserta anggota keluarganya yang pelaksanaanya terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.[[9]](#footnote-10)

1. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai optimaslisasi pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian jurnal yang ditulis Arifiartiningsih pada tahun 2016 yang berjudul Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.[[10]](#footnote-11)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) secara umum sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan program tersebut, partisipasi dari BMP serta peran serta pemerintah setempat masih sangat kurang maksimal, seharusnya pemerintah memiliki andil yang cukup intensif dalam pemberdayaan BMP.

1. Hasil penelitian yang ditulis Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Admadja pada tahun 2017 yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.[[11]](#footnote-12)Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejarakan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan; (2)BUMDesa Desa Pejarakan berperan dalam meningkatnya Pendapatan Asli Desa sehingga nantinya Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian Desa; dan 3) strategi yang dijalankan Pemerintah Desa lebih kepada saling koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa, BPD dan Pihak Pengelola, serta identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa, sistem informasimanajemen aset desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset desa, dan keterlibatan jasa penilai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.Jenis data yang digunakan dalam penelitianini adalah data primer dan data sekunder.
2. Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah (2015)

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat dalam pemabngunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”[[12]](#footnote-13)Jurnal Administrasi Negara.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembngunan desa Sedatigede Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo serta bagaimana Faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian meunjukkan bahwa peran pemerintah masyarakat dalam pemabngunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah masyarakat telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembagunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah masih adanya aggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

1. **Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu juga untuk menguji ataupun menyingkronkan data lapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan unruk lebih mejelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas denga kerangka dasar pemikiran yang benar.

Teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahua tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Kecuali (1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dan fakta-fakta hasil pengamatan, teori itu juga; (2) memberikan keragka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; (3) memberi lamaran terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi; (4) mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejalah-gejalah yang telah atau sedang terjadi[[13]](#footnote-14).

1. **Optimalisasi**

Optimal di definisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan[[14]](#footnote-15). Optimalisasi adalah hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”[[15]](#footnote-16). Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sedang menurut Winardi Optimlaisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan[[16]](#footnote-17), sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau yang dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dari pengertian optimalisasi di atas, maka yang penulis maksudkan adalah mengoptimalkan peran dan fungsi pendamping desa dalam pembangunan desa.

1. **Kebijakan Publik**

a. Pengertian Kebijakan Publik

Penggunaan istilah kebijakan (policy) seringkali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar.

Bagi para pembuat kebijakan (policymakers) istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun, bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan[[17]](#footnote-18).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak[[18]](#footnote-19). Pengertian mengenai Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah[[19]](#footnote-20).

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan dalam menganalisis suatu kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut terhadap kebijakan publik dapat dikelompokkan oleh menurut Willian Dunn, sebagai berikut:[[20]](#footnote-21)

a) Tahap Penyusunan Agenda

b) Tahap formulasi kebijakan

c) Tahap adopsi kebijakan

d) Tahap Implementasi kebijakan

e) Tahap evaluasi kebijakan

c. Ciri-ciri Kebijakan Publik

David Easton dalam Wahab, mengemukakan bahwa ciri-ciri khusus kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari penjelasan Easton di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan, yakni:[[21]](#footnote-22)

a) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai prilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

b) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas, tindakan-tindakan yang saling terkait dan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat.

c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

d) Kebijakan pemerintah mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalammasalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

d. Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gedeian, mendefinisikan efektivitas adalah Thatis, the greater the extentit which han organization’s goals are metor surpassed, the greater its effectivenes (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).[[22]](#footnote-23)

**4. Desmigratif**

1. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Program Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal TKI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan utamanya bagi keluarga TKI dan TKI Purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI Purna, pembentukan communityparenting, menumbuhkembangkan koperasi sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

4. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

6. Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Keluarga TKI adalah suami/istri atau anak atau ayah/ibu dari TKI yang sedang bekerjadi luar negeri.

7. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut dengan TKI Purna adalah tenaga kerja Indonesia yang sudah tidak bekerja di luar negeri dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.

8. Layanan informasi ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut layanan migrasi, adalah layanan informasi ketenagakerjaan yang diberikan kepada masyarakat desa, untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di dalamnya pengembangan usaha produktif

Program desmigratif adalah program untuk pananganan desa migrant produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon tenaga kerja indonesia, tenaga kerja Indonesia purna beserta anggota keluarganya yang pelaksanaanya terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.[[23]](#footnote-24)

1. Pilar Utama[[24]](#footnote-25)

Program ini terdiri atas seperangkat kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara Kemnaker, beserta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintahan desa. Sasarannya yaitu pelayanan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri, PMI Purna, dan keluarga PMI.

Apalagi desa sebagai fokus program Desmigratif, sangat penting dijangkau secara nasional. Program Desmigratif diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan, yaitu Desa Kenanga di Indramayu, Jawa Barat, dan Desa Kuripan di Wonosobo, Jawa Tengah.

Pada 2017, Kemnaker berhasil membina 122 desa, kemudian pada 2018 membina 130 desa tersebar di 65 kabupaten/kota.

Lokasi Desmigratif saat ini berjumlah 252 Desa dan rencananya pada tahun 2019 bertambah 150 desa.

Program Desmigratif berisi 4 pilar utama, yaitu pertama, sebagai pusat layanan migrasi, dengan orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal.

Kedua, kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Ini kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu PMI dan keluarga nya agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup penelusuran potensi unggulan desa, pelatihan untuk usaha produktif, tenaga pendampingan untuk usaha produktif, bantuan peralatan sarana produktif hingga pemasarannya, sehingga nantinya pada saat PMI yang bekerja di luar negeri mengirimkan uangnya atau sudah kembali ke desa maka sudah ada basis usaha produktif yang bisa di bangun PMI beserta keluarganya.

Desmigratif juga mengusung konsep pelatihan berbasis masyarakat meliputi pelatihan, produksi dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas PMI beserta keluarganya dengan mengembangkan wirausaha mandiri di daerah setempat serta mendukung kebijakan one village one product.

Ketiga, kegiatan untuk menangani anak-anak PMI atau anakanak buruh migran dalam bentuk communityparenting. Dengan kegiatan ini anak-anak PMI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar mengajar.

Dalam konteks ini orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik agar mereka ini bisa terus bersekolah mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan masa kanak-kanak mereka.

Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.

1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Desa Migran Produktif di desa asal TKI.

b. Program Desa Migran Produktif dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan keluarga TKI yang sejahtera pada desa asal TKI yang memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Tujuan

Program Desmigratif bertujuan untuk:

a. melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja baik di dalam dan luar negeri yang dimulai dari Desa asal TKI dan memberdayakan TKI Purna beserta keluarganya;

b. mendorong peran aktif Pemerintah Desa di desa asal TKI dan seluruhpemangku kepentingan;

c. menekan jumlah TKI Non Prosedural.

1. **Metode Penelitian**
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif, menurut bogdan dan taylor yang dikutip lexy, penelitian kualitatif adalah kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati[[25]](#footnote-26)

Dalam hal ini peneliti dituntut langsung terjun ke lapangan dimana penelitian dilakukan, kemudian peneliti menggunakan pendekatan terhadap masyarakat yang dijadikan sebagai bahan informasi, sehingga dapat diperoleh dat-data secara keseluruhan dan tertulis.

1. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul yang digunakan oleh peneliti,lokasi penelitian berada di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dikarenakan Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah salah satu desa yang mempunyai program Desmigratif dan satu-satunya di Kecamatan Solokuro, Desa Payaman juga sebagai desa dengan jumlah tertinggi sekabupaten Lamongan yang masyarakatnya menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), sehingga Dalam segi perberdayaan masyarakat desa ini perlu adanya pengembangan dilihat dari segi ekonomi dan kondisi sosial masyarakatnya.

1. Informan penelitian

Dalam penentuan informan berdasarkan prosedur penentuan informan *purposive sampling,* dimana merupakan salah satu strategi menentukan informan dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang dipilih dan relevan dengan masalah yang diteliti.[[26]](#footnote-27)

peneliti telah menentukan informan yang relevan dan dianggap bisa memberikan informasi mengenai masalah yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Desa Payaman.
2. Pelaksana program Desmigratif Desa Payaman
3. Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lamongan
4. Informan lain yaitu masyarakat di Desa Payaman yang berjumlah 4 orang yang terjun langsug atau anggota dalam kelompok tenaga kerja mandiri.
5. Fokus Penelitian
6. Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan, dengan indikator yaitu :
7. Kemampuan Pemerintah Desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pengembangan masyarakat.
8. Mediasi dan negosiasi, yaitu Pemerintah Desa dapat bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan tenaga kerja mandiri.
9. Pemberi dukungan, yaitu Pemerintah Desa memberikan dukungan pada setiap kegiatan tenaga kerja mandiri
10. Fasilitasi kelompok, yaitu Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan tenaga kerja mandiri
11. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, yaitu Pemerintah Desa memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
12. Mengorganisasi, yaitu Pemerintah Desa dapat merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan tenaga kerja mandiri .
13. Faktor pendukung dan penghambat peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
14. Sumber Data
15. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.
16. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah, kondisi desa, struktur organisasi, visi dan misi, program pemberdayaan serta fasilitas desa.
17. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggabungkan beberapa teknik penelitian yang tertera dibawah ini:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pecatatan secara cermat dan sistematik[[27]](#footnote-28)

1. Wawancara

Menurut moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan sumber iformasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

1. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti memperoleh data melalui benda-beda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, dll.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman terjemahan Rohidi mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu[[28]](#footnote-29) :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. **Sistematika penulisan**

Penyusunan BAB dalam proposal ini meliputi:

BAB I membahas pendahuluan yang yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan

BAB II membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari landasan teoritis, kerangka konseptual.

BAB III membahas metodologi penelitrian yang terdiridari oendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang optimalisasi program Desmigratif.

BAB V membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibuat.

1. Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 1991), hal 04. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pedoman program Desmigratif,( Kementerian ketenaga kerjaan Republik Indonesia, 2017)m hal 01. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kemnaker.co.id. pemberdayaan masyarakat desa melalui program Desmigratif diakses dari http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/pemberdayaan-masyarakat-desa-melalui-program-desmigratif-pada tanggal 15 februari 2019 [↑](#footnote-ref-4)
4. Merdeka.com, menaker berharap 4000 desa terjangkau program Desmigratif, diakses dari <https://m.meredeka.com/peristiwa/menaker-berharapo-4000-desa-terjangkau-program-desmigratif.html>, pada tanggal 09 januari 2019 pukul 11:35. [↑](#footnote-ref-5)
5. Liputan6.com, program desmigratif meningkatkan kesejahteraan TKI Dari desa, diakses dari https:m.liputan6.com/news/read/3091245/program-desmigratif-meningkatkan-kesejahteraan-TKI-dari-desa pada tanggal 15 februari 2019. [↑](#footnote-ref-6)
6. Keputusan menteri ketenagakerjaan republic Indonesia nomor 59 tah8un 2017 tentang desa migrant produktif. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muri, *Wawancara*, Payaman, 13 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-8)
8. Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta : balai pustaka),1994, hal 800. [↑](#footnote-ref-9)
9. Keputusan menteri ketenagakerjaan republic Indonesia nomor 59 tah8un 2017 tentang desa migrant produktif [↑](#footnote-ref-10)
10. Arifiartiningsih, *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan* . (E-journal, uin suka, vol 11, no 1, 2016) [↑](#footnote-ref-11)
11. Gusti Ayu Rani Desi Andari, Nil Uh Gede Eni Sulindawati Dan Anantawikrama Tungga Admadja, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatn Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pamjarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Beleleng, Jurnal*, Universitas [Endidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, 2017. [↑](#footnote-ref-12)
12. Rizky Prasojo dan Luluk Fauziyah “*Peran Pemerintah-Masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*” Jurnal KANAL. Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 3, No 1, halm 49 tahun 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:P.TGramedia,1997),hal 19 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ali, M. A., “*Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda*” Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014 [↑](#footnote-ref-15)
15. Partanto dan M dahlan, *Kamus ilmiyah popular* ( Surabaya apolo 1994) hal 545 [↑](#footnote-ref-16)
16. Boyke richrd “*Optimalisasi peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan* ´Ilmu pemerintahan FISIP Unsrat 2016 [↑](#footnote-ref-17)
17. Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan pemerintah Daerah*, (Bandung : ALFABETA, 2014) Hal 20 [↑](#footnote-ref-18)
18. http://kbbi.web.id/bijak (Jumat, 8 januari 2019, 22.24) [↑](#footnote-ref-19)
19. Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 20. [↑](#footnote-ref-20)
20. Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress, 1999) 24 [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html>, diakses pada Rabu, 9 januari 2019. [↑](#footnote-ref-22)
22. http://www.psychologymania.com/2012/12/definisi-efektivitas.html, diakses pada kamis, 10 januari 2019 [↑](#footnote-ref-23)
23. Keputusan menteri ketenagakerjaan republic Indonesia nomor 59 tah8un 2017 tentang desa migrant produktif [↑](#footnote-ref-24)
24. Media Indonesia.com: Desmigratif: perlindungan pekerja migrant mulai dari desa diakses dari <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/203147-desmigratif-perlindungan-pekerja-migran-mulai-dari-desa-> pada tanggal 18 februari 2019. [↑](#footnote-ref-25)
25. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999) [↑](#footnote-ref-26)
26. Burhan bungin, *penelitian kualitatif* (jakarta: kenaca penada media group, 2007), hal 107 [↑](#footnote-ref-27)
27. Soeatno & Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Management Perusahaan YKP, 1995) Hal 89 [↑](#footnote-ref-28)
28. Rohidi, T.R. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia. Hal 20. [↑](#footnote-ref-29)